



Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik Dalam Mewujudkan *Good Governance* Melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik

Dito Aditia Darma Nst*, Melia Fauzia, Mhd. Nanda Rizki, Nabilah Putri Surahman, Nurmayani

Universitas Pembangunan Panca Budi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3592>

*Correspondence: Dito Aditia Darma

Nst

Email:

ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

Received: 22-11-2025

Accepted: 22-12-2025

Published: 22-01-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research examines the effectiveness of public sector performance auditing in promoting good governance through accountability in public financial management. Transparent, accountable, effective, and participatory public financial management is a crucial factor in achieving good governance) (however, its implementation in Indonesia still faces several challenges, including weaknesses in internal control systems, low program effectiveness, and inadequate follow-up on audit recommendations. This study aims to analyze the role of public sector performance auditing in strengthening accountability and improving the quality of government governance. The research employs a descriptive qualitative approach based on a literature review, with secondary data collected from audit reports issued by the Audit Board of Indonesia (BPK) and the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP), national regulations, and scholarly journals related to public sector auditing, accountability, and good governance. The findings indicate that performance auditing plays a significant role in enhancing accountability in public financial management, assessing the effectiveness, efficiency, and economy of budget utilization, and providing recommendations for policy improvement. Nevertheless, the effectiveness of performance auditing remains constrained by limited auditor capacity, weak internal control systems, and low levels of follow-up on audit recommendations. Future efforts are expected to optimize performance auditing through improvements in auditor competence and workforce size, stronger commitment from government institutions to implement audit recommendations, and the development of more effective internal control systems, thereby enabling the sustainable realization of good governance

Keywords: Performance Audit, Accountability, Good Governance

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan publik merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan demokratis, pengelolaan keuangan publik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep good governance, yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik (Mardiasmo, 2018).

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan sistemik. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI secara konsisten menunjukkan adanya temuan pemeriksaan yang signifikan setiap tahunnya, yang meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rendahnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan publik belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian kinerja dan manfaat (*outcome*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat (BPK RI, 2023).

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama good governance yang menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif (LAN & BPKP, 2015). Dalam konteks tersebut, audit kinerja sektor publik hadir sebagai instrumen pengawasan yang strategis. Audit kinerja menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) dalam pengelolaan keuangan negara, dengan fokus pada pencapaian tujuan program dan kegiatan pemerintah (BPK RI, 2020). Berbeda dengan audit keuangan yang menitikberatkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan, audit kinerja berorientasi pada evaluasi kinerja dan hasil (*outcome*), sehingga mampu memberikan rekomendasi

yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, efektivitas audit kinerja sektor publik menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik serta mendorong terwujudnya good governance. Audit kinerja yang dilaksanakan secara independen, profesional, dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mencegah pemborosan anggaran, serta memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kajian terdahulu sebagian besar menitikberatkan pada audit keuangan, opini audit, transparansi, atau pencegahan korupsi, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis audit kinerja sektor publik dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan publik dan *good governance* masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan teori antara tujuan ideal audit kinerja dengan kajian akademik yang tersedia, sehingga perlu dilakukan studi kepustakaan yang menelaah efektivitas audit kinerja dari perspektif literatur, dokumen resmi, dan jurnal. Penelitian ini penting dilakukan mengingat audit kinerja merupakan instrumen pengawasan yang berorientasi pada perbaikan kinerja sektor publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik.

Penelitian terdahulu belum menggunakan teori yang memadai (Santoso et al, 2024) (Tohopi et al, 2024) (Anjani & Fadly, 2025). Penelitian terdahulu yang referensi (Nabila & Maulina, 2025). Kebaruan penelitian ini menggunakan teori good governance dan

akuntabilitas. Kebaruan penelitian ini dan terletak pada pendekatan integratif yang mengaitkan audit kinerja sektor publik dengan good governance melalui perspektif akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, dengan menjadikan laporan resmi BPK RI dan regulasi nasional sebagai basis analisis utama.

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan sektor publik, antara lain masih ditemukannya kelemahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, efektivitas audit kinerja sektor publik yang belum berjalan secara optimal, rendahnya tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit, serta belum sepenuhnya terwujudnya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan sektor publik. Bagaimana efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan *good governance* melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Untuk menganalisis efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana efektivitas audit kinerja sektor publik dapat mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Good Governance

Konsep *good governance* berkembang sebagai respons terhadap tuntutan reformasi sektor publik dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta pasar yang efisien. Sementara itu, United Nations Development Programme (UNDP) menegaskan bahwa *good governance* mencakup prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan (World Bank, 1992) (UNDP, 1997).

Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum. Menurut UNDP, *good governance* mencakup beberapa prinsip utama:

- a. Partisipasi masyarakat, di mana warga negara berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. *Rule of Law*, yaitu penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan konsisten.
- c. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengetahui penggunaan sumber daya negara.
- d. Responsivitas, yakni kemampuan pemerintah dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- e. Efisiensi dan efektivitas, yaitu pengelolaan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

- f. Akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang diambil

Penelitian terdahulu yang terkait tentang Good governance. Good governance mediates the influence of accounting & internal supervision on government performance (Familia Irene, 2024). Good governance is improved when public sector accounting principles enhance transparency and accountability (KAWEDAR, 2024). The government agency has implemented accountability systems which contribute to good governance (Koyongian, 2024). Internal audit secara signifikan berkontribusi pada good governance tetapi terhambat oleh keterbatasan kompetensi auditor (Williyanto et al, 2025). Hasil audit dan good governance dapat meningkatkan kinerja pemerintahan lokal (Amyulianthy et al, 2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik berkontribusi pada kepercayaan publik dan good governance (Loso Judijanto et al, 2024). Pengaruh akuntansi sektor publik, good governance, dan pengawasan internal berkontribusi pada kinerja instansi pemerintah (Karlina et al, 2023). Penerapan good governance berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pangestu et al, 2025). Kinerja aparatur pemerintah dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap penerapan good governance (Sari et al, 2025).

Dalam konteks sektor publik, *good governance* menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik menuntut adanya mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja. Audit kinerja dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2018) (BPK RI, 2020).

Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif. Audit kinerja menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai prinsip *good governance*.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Akuntabilitas merupakan konsep sentral dalam administrasi publik dan pengelolaan keuangan negara. Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas sektor publik sebagai kewajiban pihak pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan sumber daya tersebut kepada publik dan lembaga pengawas. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas kebijakan, yang menekankan pencapaian tujuan serta dampak kebijakan bagi masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Audit kinerja berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah dengan menilai sejauh mana program dan kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Melalui evaluasi kinerja dan pemberian rekomendasi perbaikan, audit kinerja membantu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban

pemerintah atas hasil pelaksanaan program dan penggunaan anggaran publik (BPK RI, 2020) (Mahmudi, 2016).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban entitas publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan mandat, yaitu masyarakat (Mahmudi, 2015). Akuntabilitas tidak hanya sebatas pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial atas keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hopwood dan Tomkins (1984) serta Ellwood (1993) dalam Mahmudi (2015) membagi akuntabilitas menjadi lima dimensi:

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan norma hukum yang berlaku.
- b. Akuntabilitas manajerial, yaitu pertanggungjawaban atas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program.
- c. Akuntabilitas program, yaitu kewajiban untuk menunjukkan hasil dan dampak kegiatan pemerintah.
- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu tanggung jawab terhadap alasan pemilihan kebijakan yang diambil.
- e. Akuntabilitas finansial, yaitu tanggung jawab atas penggunaan dana publik secara sah dan wajar.

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Audit quality plays a significant role in influencing public sector performance and accountability (Pratiwi, 2025). Audit opinions, institutional variables influence financial performance and accountability (Putri, 2025). Audit sektor publik sebagai katalisator efektif dalam meningkatkan akuntabilitas publik (Prananda et al, 2025). Integrating performance evaluation improves accountability in public financial management (Nurfadila, 2024). Public sector accounting plays an important role in promoting accountability and financial transparency (Setyawan, 2025). Public sector accounting and supervision influence financial reporting and accountability (Oktavianto, 2025). Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan memiliki dampak terhadap ketepatan laporan keuangan sehingga mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah (Oktavianto, 2024). Implementasi akuntansi sektor publik memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Gea, 2025). Audit sektor publik berperan signifikan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan regional Nigeria (Joseph, 2023).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara transparan dan berorientasi pada hasil. Artinya, keberhasilan suatu instansi tidak hanya dilihat dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kinerja yang nyata. Audit kinerja menjadi sarana untuk menilai sejauh mana tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan benar.

Audit Kinerja di Sektor Publik

Audit kinerja merupakan pemeriksaan sistematis terhadap kegiatan pemerintah untuk menilai sejauh mana sumber daya telah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan utama audit kinerja adalah untuk memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kinerja organisasi publik. Audit ini berperan sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) agar lembaga pemerintah dapat memperbaiki kebijakan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, dan memastikan hasil kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Menurut BPKP-RI (2018), audit kinerja dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Perencanaan audit, yaitu tahap pengumpulan informasi awal dan penentuan ruang lingkup audit.
- b. Pelaksanaan audit, yaitu tahap pemeriksaan lapangan dan pengumpulan bukti.
- c. Pelaporan hasil audit, yaitu penyusunan laporan yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi.
- d. Tindak lanjut audit, yaitu tahap penting untuk memastikan rekomendasi audit dijalankan oleh instansi terkait.

Audit kinerja tidak hanya mendeteksi kelemahan, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan publik secara berkelanjutan.

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Audit kinerja. Performance audits are believed to improve transparency and enable more economical, efficient, and effective use of public resources (Gcobani, 2025). Performance audits and functional oversight show influence on public accountability (Anjani, 2025). Audit kinerja penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya kebijakan publik (Nabila, 2025). Performance audit meningkatkan transparansi dan penggunaan sumber daya publik secara efektif (Mkwela, Twala & Fobosi, 2025). Internal audit efficiency enhances public sector performance effectiveness (Ariyo, 2025). Audit kinerja dalam organisasi sektor publik dinilai secara sistematis untuk meningkatkan akuntabilitas publik melalui fungsi pengawasan fungsional (Nugrahani, 2023). Pengukuran kinerja dan akuntabilitas publik merupakan alat penting untuk menilai efektivitas manajemen pemerintah daerah (Akbar, 2025).

Efektivitas audit kinerja sektor publik

Efektivitas audit kinerja sektor publik juga berkaitan erat dengan kemampuan lembaga audit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor internal, dalam melakukan pemeriksaan yang objektif, independen, dan profesional. Audit yang dilakukan secara profesional mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan dan berdampak, sehingga menjadi pendorong perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, audit kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi semata, tetapi juga sebagai instrumen perubahan yang dapat memperkuat akuntabilitas publik, meningkatkan

pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Anjani & Fadly, 2025).

Hubungan Audit Kinerja, Akuntabilitas, dan Good Governance

Audit kinerja memperkuat prinsip akuntabilitas dengan menyediakan informasi objektif mengenai hasil kinerja dan penggunaan anggaran publik. Informasi ini membantu pemerintah untuk lebih transparan dalam pengambilan keputusan dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Akuntabilitas yang meningkat pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, efektivitas audit kinerja berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pemerintahan yang transparan, efisien, dan berintegritas.

Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang bertujuan untuk memahami hubungan antara audit kinerja, akuntabilitas, dan *good governance* berdasarkan kajian pustaka dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu Studi Dokumentasi dan Observasi Non-Partisipatif. Teknik analisis data dilakukan dengan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dari Laporan hasil audit BPK dan BPKP, Peraturan pemerintah seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Buku dan jurnal ilmiah yang membahas audit sektor publik, akuntabilitas, dan *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Audit Kinerja dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Publik

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap laporan audit BPK dan BPKP, audit kinerja terbukti memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Audit kinerja tidak hanya menilai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. BPK (2022) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) menyebutkan bahwa audit kinerja mampu mengidentifikasi ketidakefisienan penggunaan anggaran serta kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

Selain itu, BPKP (2023) menegaskan bahwa audit kinerja berkontribusi dalam mendorong instansi pemerintah untuk lebih berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*), bukan sekadar penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Namun demikian, efektivitas audit kinerja masih menghadapi kendala serius, terutama rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi audit. Data BPKP (2023)

menunjukkan bahwa masih terdapat rekomendasi audit yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah, sehingga potensi perbaikan kinerja belum optimal.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi (2015) yang menyatakan bahwa audit kinerja merupakan instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian oleh Mardiasmo (2018) juga menunjukkan bahwa penerapan audit kinerja yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, penelitian Santoso, Prasetyo, dan Gaol (2024) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi informasi akan lebih optimal apabila didukung oleh sistem pengawasan yang kuat, termasuk audit kinerja. Kesamaan ini menunjukkan bahwa audit kinerja secara konsisten dipandang sebagai elemen strategis dalam mewujudkan *good governance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang lebih menekankan hubungan timbal balik antara audit kinerja, akuntabilitas, dan *good governance* secara konseptual dan normatif. Penelitian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada aspek empiris kuantitatif atau studi kasus pada instansi tertentu, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur yang mengintegrasikan berbagai sumber data sekunder, termasuk regulasi, laporan audit nasional, dan literatur akademik.

Selain itu, penelitian ini menyoroti secara lebih mendalam faktor penghambat efektivitas audit kinerja, khususnya budaya birokrasi dan lemahnya komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi audit, yang belum banyak dibahas secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

Interpretasi hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja memiliki potensi besar sebagai alat penguatan akuntabilitas dan *good governance*, namun potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Lemahnya tindak lanjut rekomendasi audit mencerminkan masih adanya resistensi birokrasi terhadap pengawasan dan perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan audit kinerja tidak hanya ditentukan oleh kualitas auditor, tetapi juga oleh komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal yang kuat.

Dengan demikian, audit kinerja harus dipahami sebagai bagian dari sistem reformasi birokrasi yang terintegrasi, bukan sekadar kegiatan pemeriksaan administratif. Apabila audit kinerja dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti secara serius, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan publik akan meningkat dan *good governance* dapat terwujud secara berkelanjutan.

Pada konteks teori *good governance*, pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif dijaga melalui pengawasan seperti audit kinerja sektor publik, yang menilai sejauh mana kebijakan dan program pemerintah dijalankan secara optimal. Pada penelitian terdahulu, partisipasi masyarakat dan transparansi informasi meningkatkan tata kelola keuangan publik di Lampung Timur, meski edukasi anggaran dan akses internet di daerah terpencil masih perlu diperbaiki, sehingga penelitian terdahulu

sejalan dengan penelitian ini sesuai dengan teori dan menegaskan peran audit kinerja dalam memperkuat akuntabilitas (Santoso, 2024).

Partisipasi kultural masyarakat sebaiknya dimanfaatkan secara intensif oleh pemerintah desa Boalemo dalam setiap tahap pengelolaan Dana Desa untuk memastikan keberhasilan kebijakan dengan mengutamakan kearifan lokal. Dalam konteks audit kinerja sektor publik, mekanisme evaluasi ini membantu menilai efektivitas dan dampak partisipasi publik pada pengelolaan Dana Desa, sehingga penelitian terdahulu sejalan dengan penelitian ini sesuai dengan teori (Tohopi, 2024).

Pada konteks teori akuntabilitas publik, kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan kinerja secara transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil diperkuat melalui audit kinerja sektor publik, yang menilai pencapaian program dan penggunaan anggaran. Pada penelitian terdahulu, penguatan akuntabilitas dalam berbagai dimensi meningkatkan transparansi fiskal, integritas kelembagaan, dan kepercayaan publik, sehingga menjadi pilar strategis dalam reformasi tata kelola sektor publik, yang menegaskan pentingnya audit kinerja sebagai instrumen evaluasi (Nabila & Maulina, 2025).

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa audit kinerja sektor publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Audit kinerja mampu menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis penggunaan anggaran serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan. Namun, efektivitas audit kinerja di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya auditor, lemahnya sistem pengendalian internal, dan rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi audit. Oleh karena itu, audit kinerja belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat peningkatan kinerja pemerintahan secara optimal. Berdasarkan penelitian ini, peningkatan kualitas audit kinerja dapat dicapai melalui penguatan kapasitas auditor, baik dari sisi kompetensi maupun jumlah personel, serta didukung oleh komitmen instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi audit dan sistem pengendalian internal yang kuat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus untuk menggambarkan secara lebih mendalam implementasi audit kinerja di lapangan.

Daftar Pustaka

- Adi, A. S. (2011). *Laporan keuangan pemerintah daerah: Mengerek responsi dan partisipasi masyarakat*.
- Akbar, R. (2025). Pengukuran kinerja dan akuntabilitas publik di Indonesia: Studi awal di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*.
- Amyulianthy, R., Muda, R., Said, J., Setyaningrum, D., & Harnovinsah. (2023). Can good governance enhance local government performance? *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*.

- Anjani, F. Z., & Fadly, R. (2025). Pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada Komisi Yudisial. *Journal on Education (JOE)*, 6(1). <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4380>
- Ariyo-Edu, A., Woli-Jimoh, I., & Subair, M. L. (2025). Internal audit efficiency and public sector performance: A study of selected MDAs in Kwara State. *Malete Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 30–42.
- Aryani, M. D. S. (2021). *Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Standar pemeriksaan keuangan negara*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman audit kinerja*. Jakarta: BPKP RI.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2023). *Laporan pengawasan intern pemerintah tahun 2023*. Jakarta: BPKP RI.
- Ellwood, S. (1993). *Public sector accountability: The challenge for the public services*. London: Chapman & Hall.
- Familia Irene, B., Iriyadi, I., Hasibuan, D., & Pangaribuan, W. S. (2024). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah dengan good governance sebagai variabel intervening. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing)*, 5(1), 179–195.
- Fajar, D. N., Pradana, M. R., & Azzurri, S. (2023). Analisis kebijakan pengelolaan keuangan sektor publik dalam mewujudkan good governance di Pemerintah Kota Gresik.
- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Gcobani, M., Twala, M. A., & Fobosi, S. C. (2025). Exploring the importance of performance audits in the public sector. *International Journal of Social Science Research and Review*, 8(4), 296–308.
- Gea, I. R. (2025). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen (SINTAMAI)*.
- Hopwood, A. G., & Tomkins, C. (1984). *Issues in public sector accounting*. Oxford: Philip Allan.
- Joseph, Y., & Onyeonu, E. O. (2023). Impact of public sector auditing in promoting accountability and transparency in North Central Zone of Nigeria. *European Journal of Theoretical and Applied Sciences*.

- Karlina, N., Lewaru, T. S., & Kriswantini, D. (2023). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, good governance, dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Rimba Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 300–306.
- Kawedar, W., Sodikin, S., Handayani, R. S., & Purwanto, A. (2019). Good governance, sistem pengendalian internal, dan kinerja keuangan organisasi sektor publik. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*.
- Koyongian, I., & Sabijono, H. (2024). Efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi dalam menerapkan good governance. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 948–956.
- Lane, J. E. (2000). *New public management*. London: Routledge.
- Lembaga Administrasi Negara, & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jakarta: LAN–BPKP.
- Loso Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan sektor publik. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 3(2), 223–233.
- Mahmudi. (2015). *Akuntansi sektor publik*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makalikis, D. C., Ilat, V., & Pusung, R. J. (2022). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhajir, I. (2019). Mewujudkan good governance melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
- Nabila, P., & Maulina, I. (2025). Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 5(1). <https://doi.org/10.36563/jamanta.v5i1.1517>
- Nugrahani, A. S. (2023). Literatur review: Pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik dengan pengawasan fungsional sebagai moderator. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 131–138.
- Nurfadila, N. (2024). Enhancing public financial management through performance evaluation and cost systems. *Advances in Management & Financial Reporting*, 2(1), 24–35.
- Oktavianto, M. R. (2024). Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4).
- Oktavianto, M. R. (2025). Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 200–215.
- Pangestu, A. P., Hawi, A. S., & Basuki, M. R. (2025). Pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 2(3), 264–271.

- Prananda, N., Rangkuti, N. S., Nasirwan, T., Irfan, R., Bahagia, R., & Zulher, Z. (2025). Audit sektor publik sebagai katalisator efektif dalam meningkatkan akuntabilitas publik. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 29–35.
- Pratiwi, D. D., & Pagalung, G. (2025). Audit quality study of public sector performance: A systematic literature review. *Atlantis Press*.
- Putri, R. D., & Hendaris, R. B. (2025). Public sector accountability and performance: The influence of institutional scale, legislative oversight, and Supreme Audit Judgements. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(6), 1752–1771.
- Santoso, A., Prasetyo, B., & Gaol, R. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 12(2), 45–60.
- Sari, R. P., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2025). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan good governance. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*.
- Setyawan, W. (2025). Bridging between financial performance and government performance: The role of public sector accounting in realizing good governance. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 2(2), 291–305.
- Tohopi, R., et al. (2024). Tata kelola kebijakan dana desa dan partisipasi kultural masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- Williyanto, D. B., Moeljadi, M., & Soedjatno, S. (2025). The effectiveness of internal audit in achieving good governance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 1–15.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan.